

Demokrasi Dalam Pemerintahan

Dra. Kristiana Lusiaty, M.Si¹

Abstrak :

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya diberbagai negara tidak selalu sama. Sekedar untuk menunjukkan betapa rakyat diletakan pada posisi penting dalam asas demokrasi ini. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara atau kebijaksanaan pemerintah, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Kata Kunci :

Demokrasi, ideologi, reformasi.

Pendahuluan

Realita kepolitikan mulai pada era orde baru sampai ke era reformasi saat ini ditandai dengan besarnya peranan pemerintah dalam menentukan jalannya negara dan keterlibatannya dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, telah menimbulkan dua tanggapan.

1. Dra. Kristiana Lusiaty, M.Si, staf pengajar pada PTIK.

Pertama, tanggapan yang mempertanyakan relevansi realitas tersebut dengan prinsip demokrasi sebagai salah satu prinsip hidup bernegara yang fundamental. Tanggapan ini seakan menggugat kenyataan bahwa peranan negara yang begitu besar dan yang pada batas tertentu telah menghambat aspirasi dan partisipasi dari bawah adalah realitas yang agaknya kurang menguntungkan bagi pelaksanaan demokrasi dan perlu diambil langkah-langkah konstruktif.

Kedua, Tanggapan yang mencoba menjelaskan atau memberi pijakan teoritis atas realitas kepolitikan yang menunjukkan dominasi peran negara itu. Pada tanggapan yang kedua ini telah dimunculkan bermacam-macam pendekatan seperti patrimonialisme, pasca kolonial, beamtenstaat, politik birokratis, rezim birokratis otoritarian strategi korporatisme, sampai pada pembahasan kembali staatsidee integralistik di dalam sidang BPUPKI yang dicetuskan oleh Prof Soepomo.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Meskipun pada umumnya pengertian demokrasi itu dapat dikatakan tidak mengandung kontradiktif karena didalamnya meletakkan posisi rakyat dalam posisi amat penting, namun pelaksanaan (perwujudannya) dalam lembaga kenegaraan ternyata prinsip initelah menempuh berbagai rute yang tidak selalu sama.

Adanya berbagai rute atau pengejawantahan tentang demokrasi itu menunjukkan pula beragamnya kapasitas peranan negara maupun peranan rakyat. Indonesia sebagai satu negara yang juga lahir dari pengalaman kolonialisme setelah Perang Dunia II telah menjadikan pula demokrasi sebagai salah satu prinsip ketatanegaraannya. Terjadinya beberapa kali perubahan terhadap konstitusi atau pertukaran rezim dan pemimpin nasional tidak pernah menggeser prinsip demokrasi ini, bahkan tema penting yang selalu dikampanyekan adalah menegakkan kehidupan demokrasi yang

diyakini sebagai hak politik yang amat penting bagi rakyat. Tetapi seperti perjalanan demokrasi di dunia pada umumnya, demokrasi di Indonesia belumlah menemukan rute yang pasti artinya pengewajantahan “peran” masih berlangsung dalam torak tarik yang tidak seimbang antara negara dan masyarakat.

Konsep-konsep demokrasi

Dikenal adanya beberapa istilah demokrasi, ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, parlementer, terpimpin, pancasila, Rakyat, sovyet, nasional dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government or rule by the people*. (Kata Yunani *demos* berarti rakyat dan *kratos/ kratein* berarti kekuasaan/ berkuasa). Jadi Demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.

Setelah PD II melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Penelitian UNESCO 1949 pertamakali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Tetapi UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap *ambiguous* (mempunyai arti dua) sekurang-kurangnya ada *ambiguity/ ketidaktentuan* mengenai lembag atau cara yang dipakai untuk melaksanakan ide atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi istilah, ide dan prktek demokrasi.

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, hal ini masih dalam taraf perkembangan. Dan mengenai sifat dan cirinya terdapat dalam pelbagai tafsiran serta pandangan tetapi diluar dugaan bahwa demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam UUD 1945, dan secara eksplisit menjiwai naskah itu misalnya dalam penjelasan Sistem Pemerintahan negara yaitu :

- Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).
- Sistem konstitusional; pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak

terbatas). Berdasarkan dua istilah Rechtsstaat dan sistem konstitusi maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari UUD 1945 ialah demokrasi konstitusional. Disamping itu corak khas demokrasi Indonesia yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimuat dalam pembukaan UUD 1945.

Prinsip-prinsip Demokrasi

Secara umum prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut :

1. Adanya pembagian kekuasaan; untuk tidak timbulnya diktatorisme, kekuasaan dipisahkan/ dibagi antara pembuat dengan pelaksana UU agar terjadi saling mengawasi (checking power with power)
2. Adanya Pemilihan umum yang bebas; untuk terpilihnya pemimpin pemerintahan yang dihendaki oleh rakyat/ anggota lembaga perwakilan yang akan mewakili suara rakyat itu sendiri perlu senantiasa ada pemilu yang tidak dipengaruhi/ bebas
3. Adanya manajemen yang terbuka; untuk tidak terciptanya negara tirai besi yang kaku dan otoriter perlu keikutsertaan rakyat dalam menilai pemerintahan, hal ini terwujud bila pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dihadapan rakyat.
4. Adanya kebebasan individu; untuk membuktikan bahwa rakyat tidak dihantui rasa ketakutan setiap lapisan masyarakat mesti memiliki kebebasan berbicara, beribadah dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya.
5. Adanya peradilan yang bebas; untuk tidak ikut campurnya aparat pemerintah (dalam arti sempit) dalam peradilan umum, maka aparat peradilan harus bebas dari pengaruh eksekutif sehingga keluarga pejabat pemerintah tersebut/ pejabat pemerintah itu dapat diadili dan diputuskan hukuman dengan adil.
6. Adanya pengakuan hak minoritas; untuk adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas mesti adanya pengakuan hak misal terhadap agama, yang minoritas penganutnya/ terhadap golongan ekonomi lemah.

7. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum; untuk tidak timbulnya negara yang berdasarkan kekuasaan belaka, maka hukum khendaknya ditempatkan pada rujukan tertinggi dengan demikian warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.
8. Adanya pers yang bebas; untuk menjamin kehidupan pers yang bebas menyuarakan hati nuraninya baik penyampaian kritik terhadap pemerintah maupun terhadap diri seorang pejabat.
9. Adanya beberapa partai politik; untuk tidak timbul diktator partai diperlukan beberapa parpol yang bebas bersaing mengemukakan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat dalam negara tersebut. Buktinya dengan vokalnya para anggota parlemen dan bebasnya mereka dari kekhawatiran recall organisasi yang mengutusny.
10. Adanya konsensus; untuk menyelesaikan konflik seperti timbulnya protes dan demonstrasi diselesaikan dengan konsensus dan negosiasi bukan dengan penekanan dan intimidasi apalagi dengan kekerasan
11. Adanya persetujuan; untuk tiap tindakan pemerintah terutama pengambilan keputusan dan kebijaksanaan di negara demokrasi dibutuhkan persetujuan dari pihak legislatif terlebih dulu.
12. Adanya pemerintahan yang konstitusional; untuk tidak timbulnya negara yang bersifat absolutisme yaitu kekuasaan yang tidak terbatas, maka pemerintahan harus berdasarkan sistem konstitusi/ hukum dasar.
13. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian; untuk adanya ketentuan tentang pendemokrasian. UUD suatu negara mesti mencantumkan tertulis bahwa kedaulatannya berada ditangan rakyat.
14. Adanya pengawasan terhadap administrasi negara; untuk terciptanya manajemen dan organisasi pemerintahan mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat seutuhnya, mutlak diperlukan adanya pengawasan terhadap jalannya dan pengaturan administrasi negara.
15. Adanya perlindungan hak asasi; untuk melindungi harkat kemanusiaan, diperlukan perlindungan hak asasi sepanjang memperhatikan nilai-nilai luhur dan norma agama.
16. Adanya pemerintahan yang mayoritas; untuk menjamin tidak terjadinya

kekuasaan ditangan satu orang, pemerintahan dijalankan secara mayoritas. Karena tidak memungkinkan seluruh lapisan masyarakat memerintah bersama maka diserahkan kepada beberapa orang kelompok elit pemerintahan, namun dalam pemilihan orangnya ditentukan dengan pemilu yang benar.

17. Adanya persaingan keahlian; Untuk penempatan pejabat dalam pemerintahan harus benar sesuai dengan keahliannya bukan karena famili atau kolega dari pejabat yang berwenang sehingga tercipta penerimaan pegawai berdasarkan merit sistem bukan spoil sistem.
18. Adanya mekanisme politik; untuk mekanisme politik khendaknya berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintahan.
19. Adanya kebebasan kebijaksanaan negara; untuk kebijaksanaan negara khendaknya dibuat oleh badan perwakilan politik (seperti parlemen) tanpa paksaan dari pihak manapun, baik group penekan maupun salah satu partai yang berkuasa
20. Adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah; untuk musyawarah kerakyatan khendaknya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (parlemen).

Demokrasi langsung terjadi bilamana untuk mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat pada suatu negara, setiap warga negara dari negara tersebut boleh langsung menyampaikan khal ikhwal persoalannya dan pendapatnya kepada pihak eksekutif

Demokrasi perwakilan terjadi bilamana untuk mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat pada suatu negara, diperlukan adanya semacam lembaga legislatif (parlemen) karena masyarakat yang begitu banyak disatu negara tidak mungkin seluruhnya duduk dilembaga tersebut

Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganegaraanya.

Partisipasi politik merupakan kegiatan warganegara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh

pemerintah sedangkan komunikasi politik merupakan penyampaian pesan yang berkenaan dengan fungsi suatu sistem politik.

Pada hakikatnya teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filsuf yang mencetuskan gagasan ini antara lain John Locke (Inggris), Montesquieu (Prancis)

Menurut Friedrich Sthall ada 4 unsur rechtsstaat meliputi :

- Hak-hak manusia
- Pemisahan antara pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
- Pemerintah berdasarkan peraturan
- Peradilan administrasi dalam perselisihan

Sedangkan menurut AN Dicey ada 3 unsur rule of law yaitu :

1. Supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh UU serta keputusan-keputusan pengadilan

Menurut Henry B.Mayo, sistem politik yang demokratis adalah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 masa yaitu :

1. Masa RI I, yaitu masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai karena itu dinamakan demokrasi parlementer

2. Masa RI II, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokraskonstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat
3. Masa RI III yaitu masa demokrasi pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidetil.

Lingkungan Khusus Yang mempengaruhi Pemerintahan

Pengetahuan lingkungan fisik dapat memberikan penjelasan perkembangan dan pengaruh hubungan lingkungan dengan kehidupan manusia serta sebaliknya pengaruh kehidupan manusia terhadap lingkungan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Lingkungan fisik dapat digolongkan ke dalam 3 lingkungan fisik yaitu lingkungan geografis, sumberdaya alam dan kekayaan alam serta penduduk.

Pengaruh lingkungan geografi terhadap kehidupan bernegara dapat dikelompokan atas 7 dimensi pengaruh lingkungan negara dan pemerintahan yaitu letak negara dalam rotasi bola dunia, bentuk daratan, bentuk air kesuburan tanah dan mineral, iklim, bentuk fisik perbatasan negara dan besar kecilnya wilayah negara.

Sumber daya alam adalah bagi potensi yang terdapat didalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia. Kekayaan alam adalah bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia. Kekayaan alam adalah berbagai jenis tumbuhan, hewn, dan berbagai material dalam kandungan bumi, baik benda cair maupun benda padat yang dapat memberi manfaat kepada manusia yang memilikinya.

Manusia (penduduk) sebagai komunitas yang mendiami bagian-bagianbumi sebagaimana makhluk hidup lainnya merupakan salah satu faktor lingkungan fisik, Manusia (penduduk) tidak saja sebagai tujuan tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkanuntuk kehidupan manusia itu sendiri. Dengan kata lain disamping manusia (penduduk) sebagai titik pusat atau tujuan dari lingkungannya.

Lingkungan sosial pemerintahan adalah semua aspek kehidupan manusia sebagai homo sosial, homo politicon, homo economic, dan homo

sapiens di dalam kehidupan bernegara. Semua aspek kehidupan tersebut tidak merupakan unsur yang berdiri sendiri yang lepas dari unsur-unsur lain. Perubahan terhadap unsur yang satu akan berpengaruh terhadap unsur yang lainnya, hubungan tersebut dengan lingkungan alam sekitarnya semakin hari semakin mendapat perhatian dalam mempelajari kehidupan bernegara dan pemerintahannya.

Ideologi adalah pola dasar tentang cita-cita yang sifatnya praktis untuk mencapai tujuan suatu kelompok organisasi dalam kehidupan bernegara meliputi bidang sosial, politik, ekonomi dsb. Bentuk ekstrim dari ideologi bila sifatnya memaksa untuk dijadikan cara hidup yang menggariskan apa yang tidak sejalan dengan ideologinya harus dianggap sebagai penyakit atau musuh. Pada umumnya cara-cara yang ditempuh ideologist untuk menciptakan ideologinya dilakukan melalui :

1. Ideologi diciptakan melalui hasil penelitian atas berbagai ideologi yang ada
2. Ideologi dirumuskan/ diciptakan dari hasil pengalaman kelompok/ bangsa yang bersangkutan
3. Dari pemikiran filosofis merumuskan ideologi bangsanya dari berbagai pemikiran filosofis atau atas dasar ajaran agama yang ada.

Sosial budaya sebagai bagian dari unsur lingkungan sosial pemerintahan dapat dibagi atas kebudayaan yang sifatnya nonmaterial (bahasa, nilai, norma, pengetahuan, pengertian dasar yang dihayati oleh masyarakat) dan yang sifatnya material atau fisik adalah benda yang dihasilkan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya peralatan, jalan raya, rumah, irigasi, mainan, dll.

Sosial politik mengandung pengertian yang luas dan fleksibel sehingga belum ada definisi yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu yang penting bukan definisinya tetapi pengertian tentang kekuasaan negara, bagaimana terbentuknya kekuasaan negara, bagaimana sistem yang baik, bagaimana pembangunan kekuasaan dalam kelembagaan, bagaimana pengambilan keputusan yang baik, dan bagaimana administrasinya dll.

Lembaga perekonomian dikatakan sebagai keseluruhanstruktur kemasyarakatan karena lembaga ini menghubungkan setiap orang dalam

kehidupan ekonomi, baik dalam proses produksi maupun dalam proses distribusi barang dan jasa.

Keamanan sosial mencakup dimensi yang sangat luas yang tidak terpisahkan dari masalah ketertiban dan pertahanan. Keamanan sosial meliputi pengertian perseorangan, kelompok, masyarakat, dan semua aspeknya. Gangguan terhadap keamanan sosial dapat bersifat material dan imaterial dapat datang dari dalam maupun dari luar. Dalam perkembangan dewasa ini keamanan sosial dapat dibedakan antara pertahanan keamanan yang berupa gangguan terhadap kepentingan nasional yang timbul dari dalam maupun dari luar dengan ketertiban sosial menyangkut gangguan terhadap kepentingan warga baik secara individu maupun secara kelompok.

Penutup

Tuntutan masyarakat di era reformasi sekarang ini adalah reformasi dalam segala bidang. Jadi reformasi yang harus dijalankan adalah reformasi multi dimensi. Dalam operasionalisasinya reformasi harus diarahkan kepada perbaikan yang asasi atas penyimpangan dan kekeliruan. Demokratisasi, kedaulatan rakyat, struktur pemerintahan, struktur infra semuanya yang dapat memberi keleluasaan bagi terciptanya Goodlife dengan ukuran Good Governance dan Clean Government. Dengan menyadari era sekarang dan era masa lalu demi menjemput era globalisasi masa depan yang gemilang bagi Bangsa Indonesia baru yang diharapkan.

Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. (*)